



PEMERINTAH
PROVINSI
JAMBI



LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KESEHATAN PROVINSI **JAMBI**
TAHUN **2022**



DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

Jalan R.M Nur Atmadibrata No. 08 Telanaipura - Jambi Telp. 0741-62701

Tahun 2022

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. MHD. FERY KUSNADI, Sp. OG
Pembina Tk. I
NIP. 19750525 2002121002

DAFTAR ISI

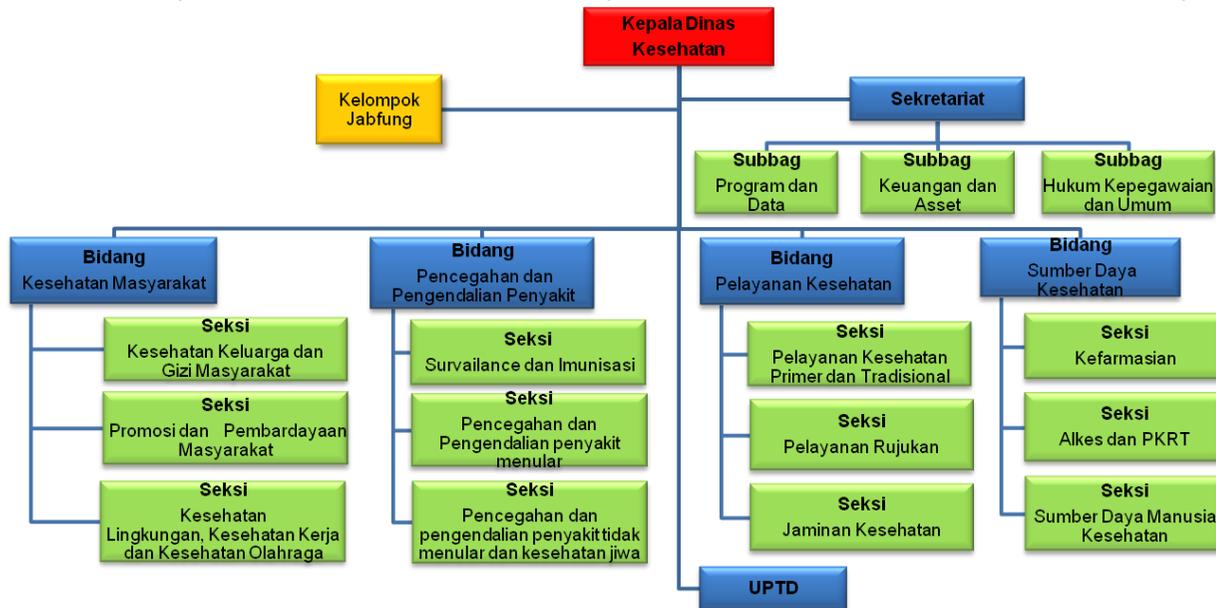
KATA PENGANTAR	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Struktur Organisasi 1
1.2.	Fungsi dan Tugas 2
1.3.	Isu-Isu Strategis 7
1.4.	Keadaan Pegawai 8
1.5.	Keadaan Sarana dan Prasarana 13
1.6.	Keuangan 15
1.7.	Sistematika LKj IP 16
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.	Perencanaan Strategis 18
2.1.1.	Visi dan Misi Kepala Daerah
2.1.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
2.1.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi
2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 28
2.3.	Realisasi Anggaran Tahun 2022 29
2.3.1.	Target Belanja Dinas Kesehatan Provinsi
2.3.2.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2021 33
3.2.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 41
BAB IV	PENUTUP 76
LAMPIRAN :	
Lampiran 1 Struktur Organisasi	
Lampiran 2 Matriks Renstra Tahun 2021-2026	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2016, Tanggal 07 November 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut;



1.2. FUNGSI DAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas kesehatan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan, dijabarkan menjadi tugas dan fungsi mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV, selanjutnya dijabarkan lagi menjadi uraian tugas sesuai dengan program dan kegiatan.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kemas),
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P),
5. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes),
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK),
7. UPTD, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari unsur-unsur organisasi maka tugas pokok dan fungsi masing - masing pejabat eselon III adalah sbb :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,
- b. Pengkoordinasian pelaksana tugas dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,
- c. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,
- d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
- d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
- f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveillance dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,

- d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa,
- f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
- d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
- f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional, dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mempunyai 2 (dua) UPT yaitu Balai Pelatihan Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang sampai saat ini anggarannya masih menjadi satu dengan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

- a. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- b. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- c. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- d. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
- f. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- g. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- h. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- i. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan dan *urban-rural* masih terjadi, untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.

1.4. KEADAAN PEGAWAI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi didukung sumberdaya yang tersebar dalam Instans Induk (Dinas Kesehatan) dan UPTD (Laboratorium Kesehatan Daerah dan Balai Pelatihan Kesehatan)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 280 pegawai yang terdiri 27 pejabat struktural, 58 pejabat fungsional tertentu, dan 195 pejabat fungsional umum yang terbagi di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi dan Balai Pelatihan Kesehatan Jambi.

Profil Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi disajikan dalam table berikut:

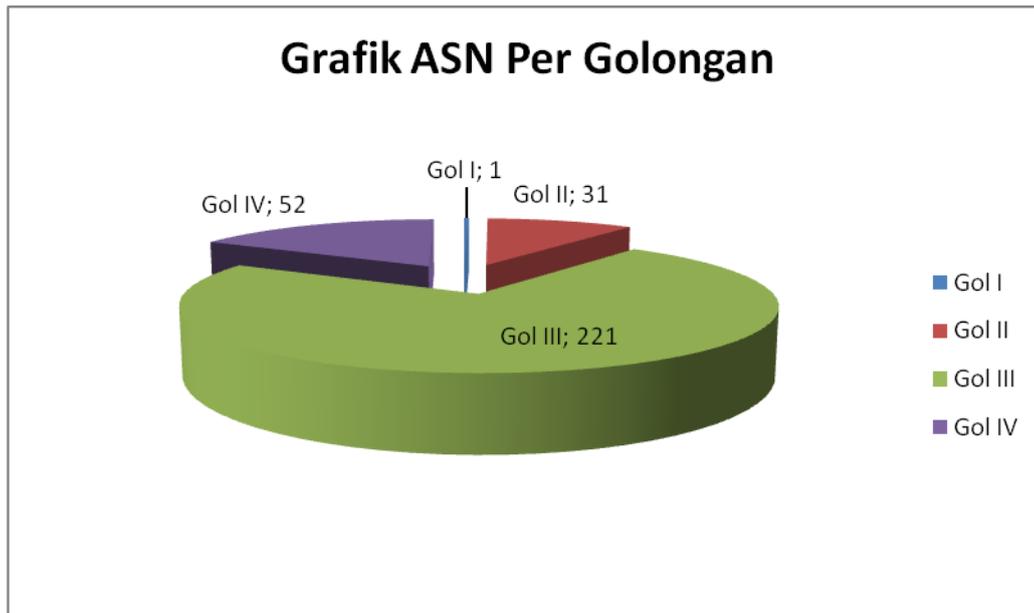
Tabel 1.1
Data ASN berdasarkan DUK
Keadaan s.d. Desember Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN KEPANGKATAN				JLH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	0	23	164	41	228
2	Labkes	0	2	20	11	33
3	Bepelkes	0	3	11	5	19
	Jumlah	0	28	195	57	280

Pada tabel 1.1 (Data ASN berdasarkan DUK) sebagaimana di atas diketahui bahwa dari sejumlah 280 orang pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan UPT Dinas tahun 2022, jumlah pegawai dengan golongan IV sebanyak 57 orang; golongan III sejumlah 195 orang ; golongan II adalah 28 dan

golongan I tidak ada, yang tersebar di UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Jika di persentasekan maka jumlah pegawai dengan golongan III menempati urutan terbanyak (69,9%). Sementara pegawai dengan golongan IV adalah 20,35%, dan golongan II berjumlah 10%.

Gambaran mengenai data ASN berdasarkan DUK sebagaimana di atas dapat dilihat pada grafik dibawah ini berikut:



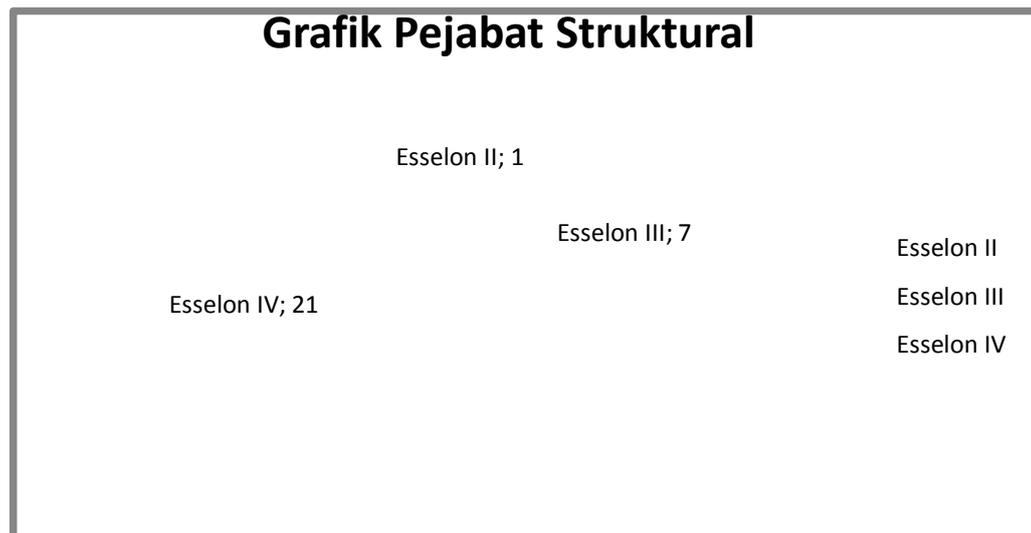
Tabel 1.2
Data Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Keadaan s.d. Desember Tahun 2022

NO	URAIAN	ESELON				JLH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	0	1	5	15	21
2	Labkes	0	0	1	3	4
3	Bapelkes	0	0	1	3	4
	JUMLAH	0	1	7	21	29

Berdasarkan tabel 2.1 (Data Pejabat Struktural) keadaan s.d. Desember Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan UPT Dinas (Labkes dan Bapelkes) dapat diketahui bahwa jumlah pejabat struktural secara keseluruhan adalah 29 orang; terdiri dari 21 orang pejabat dengan eselon IV, 7 orang

pejabat eselon III, dan untuk eselon II masih 1 orang. Apabila dilihat untuk internal Dinas Kesehatan (tanpa UPT) maka jumlah pejabat eselon IV sebanyak 15 orang dan eselon III sebesar 5 (lima) orang pejabat.

Jumlah data pejabat struktural di Dinas Kesehatan dan UPT nya pada tahun 2022 dapat juga dilihat pada grafik berikut :



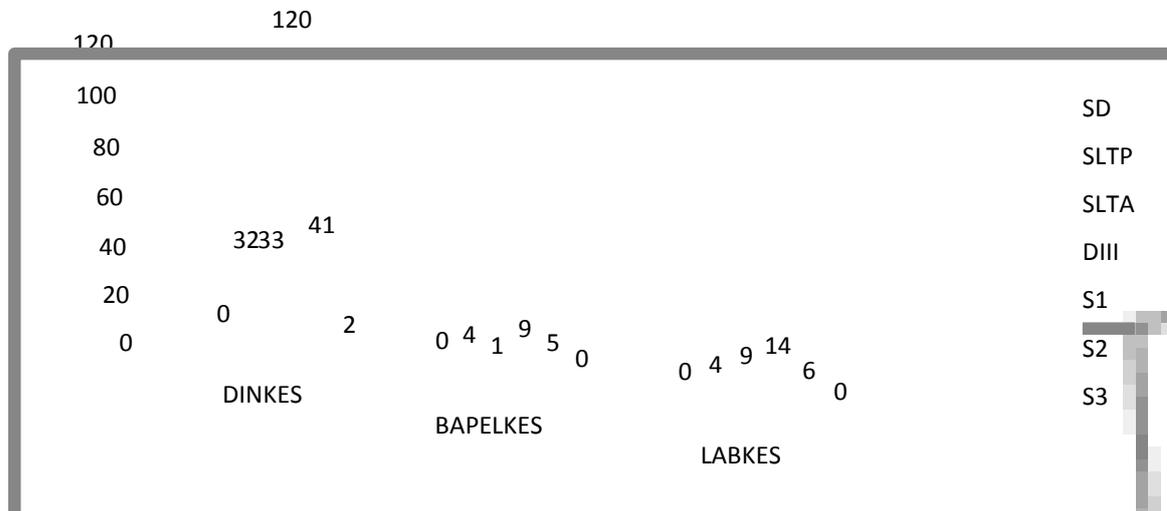
Tabel 1.3
Data ASN Berdasarkan Kualifikasi Tingkat Pendidikan
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Keadaan s.d. Desember Tahun 2022

NO	URAIAN	KLASIFIKASI TINGKAT PENDIDIKAN							JLH
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinkes Provinsi Jambi	0	0	32	33	120	41	2	228
2	Labkes	0	0	4	9	14	6	0	33
3	Bapelkes	0	0	4	1	9	5	0	19
	JUMLAH	0	0	40	43	143	52	2	280

Berdasarkan tabel 1.3 tentang data ASN berdasarkan kualifikasi tingkat Kesehatan Provinsi Jambi dan UPT-nya diketahui bahwa kualifikasi tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah dengan tingkat pendidikan strata satu (S-1) adalah 143 orang (51,07%); strata II (S-2) sejumlah 52 orang (18,57%); Diploma III sebanyak 43 orang (15,35%), sementara untuk tingkat pendidikan

SLTA ada 40 orang (14,28%). Untuk ASN dengan latar belakang pendidikan SLTA ditempatkan sebagai tenaga Cleaning Services dan sopir.

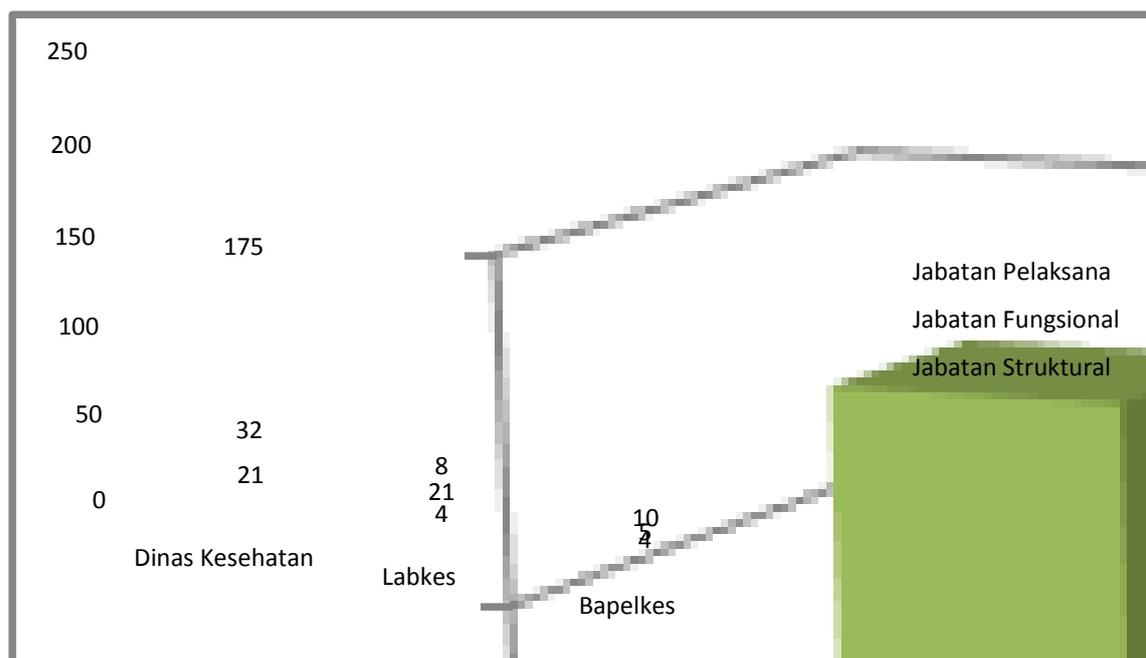
Jumlah data ASN berdasarkan Kualifikasi Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :



Tabel 1.4
Data Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Jabatan
Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Keadaan s.d. Desember 2022

NO	URAIAN	Jenis Jabatan			
		Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Total
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	21	32	175	228
2	Labkes	4	21	8	33
3	Bapelkes	4	5	10	19
	JUMLAH	29	58	193	280

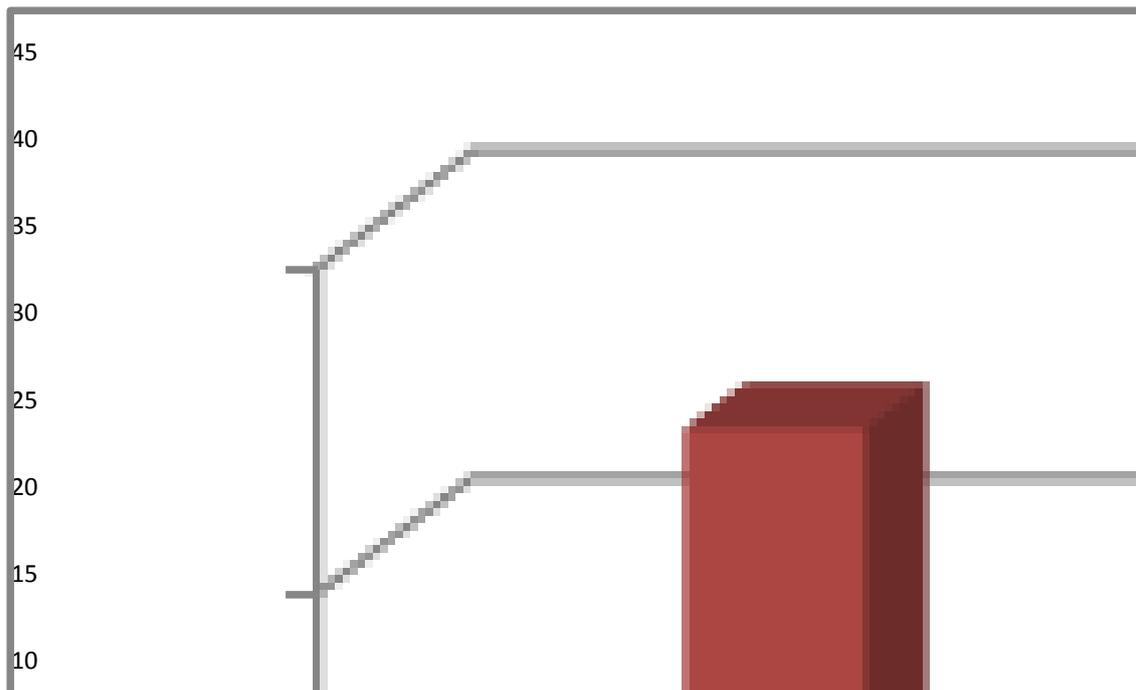
Berdasarkan tabel 1.4 tentang Jenis Jabatan Struktural, fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022, dapat diketahui jumlah Jabatan Struktural yang ada sebanyak 29 orang, Jabatan Fungsional 58 Orang sedangkan Jabatan Pelaksana 193 orang. Data tentang Jenis Jabatan dapat dilihat pada grafik berikut:



Tabel 1.5
Data Tenaga Kontrak (PTT)
Keadaan s.d. Desember 2022

NO	TEMPAT KERJA	PENDIDIKAN								TOTAL
		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Kesehatan	4	42		17	-	14	1	3	81
2	Labkes	-	7	-	9	-	7	-	1	24
3	Bapelkes	-	4	-	-	-	8	5	-	17
	JUMLAH	4	53	0	26	-	29	6	4	122

Pada tabel 1.5 di atas mengenai data Tenaga Honorer (PTT) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022 dapat diketahui jumlah tenaga Kontrak dengan anggaran APBD adalah 122 orang. Secara umum jumlah tenaga PTT dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2022

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Alat-alat besar	0		-
2	Alat-alat angkutan	82	74	8
3	Alat kantor dan rumah tangga	4.222	3.377	845
4	Alat studio dan alat komunikasi	348	337	11
5	Alat Kedokteran	16	14	2
6	Alat Laboratorium	1.641	1476	165
7	Alat Keamanan	11	10	1
8	Bangunan gedung	79	79	-
9	Jaringan	5	5	-
10	Buku perpustakaan	366	329	37

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Selain itu sarana kesehatan dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	SARANA KESEHATAN	PROVINSI	KAB/KOTA	TNI/ POLRI	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	Puskesmas	0	207	0	0	207
	- Rawat Inap	0	96	0	0	96
	- Non Rawat Inap	0	111	0	0	111
2.	Pustu	0	593	0	0	593
3.	Pusling	0	1441	0	0	1441
4.	Lab. Kesehatan	1	6	0	0	7
5.	Rumah Sakit Umum	1	15	2	19	37
6.	Rumah Sakit Khusus	1	2	0	0	3
	- RS Jiwa	1	0	0	0	1
	- RS Ibu dan Anak	0	2	0	0	2

1.6. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 telah melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi setelah APBD Perubahan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.161.572.597.365,- dengan Belanja Operasional sebesar Rp.139.018.342.554,- dan Belanja Modal sebesar Rp.22.554.254.811,-

1.7. SISTEMATIKA LKj IP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP / manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU. AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT ”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan

bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja

- Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat
- Jambi Amanah : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural
- Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Berdasarkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi masuk dalam misi ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat,

berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender dengan sasaran pembangunannya adalah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi 71,76 Tahun pada Tahun 2026.

Guna mendukung misi ke-3 tersebut, maka strategi pembangunan daerah di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid-19
2. Mendorong optimalisasi peran institusi Kesehatan
3. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
4. Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
5. Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
6. Dukungan kegiatan posyandu
7. Pengembangan RSUD Rd. Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
8. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi Kesehatan
9. Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%

Adapun Arah kebijakan daerah dalam pembangunan pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19
2. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan
4. Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2021-2026, yaitu: Program Unggulan DUMISAKE (Dua milyar Satu Kecamatan). Salah satu programnya adalah Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin; dan dukungan kegiatan posyandu. skema yang dilakukan

adalah subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut:

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jambi (jiwa)	76.586	77.086	77.586	78.086	78.586

Untuk mengukur kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi khususnya di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja dari aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum.

Adapun indikator kinerja dari aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup
2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
3. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
5. Prevalensi wasting pada balita
6. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
7. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
8. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan
9. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
10. Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan
11. Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan

Sedangkan indikator kinerja dari aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi
2. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

3. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)
4. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
5. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
6. Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak di capai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

VISI	: Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT								
MISI III	: Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia								
Uraian	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra	
			2022	2023	2024	2025	2026		
Tujuan	: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,16	71,28	71,40	71,52	71,64	71,76	71,76
Sasaran	: Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Jumlah kematian Bayi / KH	353	343	333	323	313	303	302
		Jumlah kematian ibu / KH	62	59	56	53	50	47	47
		Prevalensi stunting	21,03	16	14	12	10	8	8
		Prevalensi wasting	10,2	7,8	7,5	7,3	7	6,8	6,8
		Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	4	6	6	8	8	9	9
	Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100

		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	93	96	96	96	96	96	96
		Persentase orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV	21	45	50	55	60	65	65
		Jumlah kabupaten /kota mencapai eliminasi malaria	7	9	9	9	10	10	10
		Persentase bayi pada usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92	95	95	95	95	95	95
	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	88	100	100	100	100	100	100
		Persentase rumah sakit yang terakreditasi	80	100	100	100	100	100	100
		Persentase Layanan Laboratorium rujukan spesimen, IPTEK dan SDM Laboratorium se Provinsi Jambi	63	73	82	91	100	100	100
	Peningkatan sumber daya kesehatan	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	38	40	43	46	48	50	50
		Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C	93	95	96	97	98	100	100

		yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap							
		Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	30	20	15	10	5	0	0
		Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	50	53	58	65	72	78	78
		Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pedagang besar farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah provinsi Jambi (jiwa)	76.086	76.586	77.086	77.586	78.086	78.586	78.586
	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan.	Persentase Capaian Nilai SAKIP	71	75	77	80	83	85	85
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	84	85	86	87	87

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	a). Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat melalui penekanan pendekatan promotif dan preventif dengan optimalisasi dukungan Posyandu b). Optimalisasi Promosi Kesehatan dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	a) Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi b) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan c) Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat melalui penekanan pendekatan promotive dan preventif dengan optimalisasi dukungan posyandu
2	Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat	a) Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan satuan tugas	a) Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
3	Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Peningkatan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Meningkatkan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan SDM Kesehatan dan Peningkatan Kompetensi sesuai standar b) Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan Alat Kesehatan serta ketersediaan obat sesuai standar c) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 	Fasilitasi distribusi fasilitas Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang menjangkau seluruh Penduduk Provinsi Jambi
5	Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan.	a) Penguatan tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan.	Penguatan tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan.

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan, 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumenter sebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1 : 1,30
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1 : 0,98
2.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	59
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	343
		Prevalensi Balita Stunting	16
3.	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
		Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	54%
5.	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	73
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	83

2.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 telah melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan anggaran setelah APBD Perubahan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.161.572.597.365,- dengan Belanja Operasional sebesar Rp.139.018.342.554,- dan Belanja Modal sebesar Rp.22.554.254.811,-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022

KODE	URAIAN	TAHUN 2022			
		APBD-P	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.950.000.000,00	2.278.453.590,00	0	116,84
4.1.02	Retribusi Daerah (Bapelkes)	250.000.000,00	303.050.000,00	0	121,22
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah (BLUD Labkes)	1.700.000.000,00	1.975.403.590,00	0	116,20
Jumlah Pendapatan		1.950.000.000,00	2.278.453.590,00	0	116,84
5	BELANJA	161.572.597.365,00	147.622.262.511,31	13.950.334.854,00	91,37
5.1	BELANJA OPERASI	139.018.342.554,00	127.429.154.965,00	17.587.112.768,48	91,10
5.1.01	Belanja Pegawai	37.194.133.170,00	35.181.021.151,00	2.013.112.019,00	94,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.624.209.384,00	91.066.189.115,00	9.558.020.269,00	90,50
5.1.05	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.181.944.699,00	18.055.301,00	98,49
5.2	BELANJA MODAL	22.554.254.811,00	20.193.107.546,00	2.361.147.265,00	89,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.915.654.911,00	13.783.349.080,00	1.132.305.831,00	92,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.126.650.000,00	5.285.688.550,00	840.961.450,00	86,27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.349.949.900,00	1.109.093.796,00	240.856.104,00	82,15
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	162.000.000,00	14.976.120,00	147.023.880,00	9,24
Jumlah Belanja		161.572.597.365,00	147.622.262.511,31	13.950.334.854,00	91,37

Sumber : Subbag Keu Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 116,84% (Rp. 2.278.453.590,- dari yang ditargetkan sebesar

Rp.1.950.000.000,-). Sedangkan realisasi belanja anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 91,37% (Rp. 147.622.262.511,31 dari alokasi Rp. 161.572.597.365,00).

Dari target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebesar 95%, tercapai 91,37%. Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Dari aspek penganggaran

- Terjadi Perubahan Nomenklatur Rekening Anggaran pada Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik, pada Kepmendagri 050/5889/2020.
- Terjadi keterlambatan Juknis DAK Non Fisik. Juknis tersebut baru keluar pada bulan Mei sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juli 2022.

b. Dari aspek kegiatan

- Pembayaran Premi PBI JKN terdapat sisa yang cukup besar oleh karena penetapan peserta PBI di awal tahun terjadi pengurangan sehingga ada selisih antara jumlah peserta PBI yang di anggarkan dengan PBI yang di tetapkan di awal tahun.
- spending mandatory (DAK Fisik Penurunan Stunting), Berdasarkan KMK Nomor: 24/KM.7/2022 tentang penghentian penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Menu PMT di hentikan penyalurannya.
- Terdapat sisa Kontrak yang cukup besar terutama pada lelang Fisik

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan					93.147.039.454,-	85.757.644.283,-	92,06%
		Rasio tempat tidur per jumlah penduduk	1 : 1,30	1 : 1,37	105%			
		Rasio puskesmas per kecamatan	1 : 0,98	1 : 0,99	101%			
2	Menurunkan kematian ibu, bayi dan stunting	Penurunan jumlah kematian ibu	59	72	81,94%	1.362.420.240,-	1.310.195.626,-	96,16%
	Penurunan jumlah kematian bayi	343	274	125,18%				
	Prevalensi balita stunting	16	18	88,88%				
3	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100%	100%	100%	16.118.176.168,-	12.754.093.802,-	79,12%
	Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	449.754.722,-			
4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	54%	81,81%	150%	353.789.712,-	337.279.700,-	95,3%

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	73	81,72	111,94%	49.309.205.869,-	45.850.401.850,-	92,98%
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	87%	104,81%			
Belanja Operasional		139.018.342.554,00				127.429.154.965,00		
Belanja Modal		22.554.254.811,00				20.193.107.546,00		
Total Belanja		161.572.597.365,00				147.622.262.511,31		91,37 %

Sumber: Subbag Keuangan Dinas Kesehatan, 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk memulai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi meliputi Input, Output, Outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti SDM, yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur karena keterbatasan dana.

Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula dengan Indikator Outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, dan efektifitas.

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Target Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		Capaian (%)	Kriteria
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1 : 1,30	1 : 1,37	105%	Sangat Baik
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1 : 0,98	1 : 0,99	101%	Sangat Baik
2.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	59	72	81,94%	Tinggi
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	343	274	125,18%	Sangat Baik
		Prevalensi Balita Stunting	16	18	88,88%	Tinggi
3.	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	Sangat Baik
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	54%	36,36%	66,66%	Sedang
5.	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	73	81,72	111,94%	Sangat Baik
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	83	87	104,81%	Sangat Baik
	Rata – Rata Kinerja				98,54%	Sangat Baik

Sumber : PK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2022

Dari tabel di atas, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ada didalam 5 (Lima) sasaran strategis. Pada tahun 2022 ada 7 (tujuh) indikator telah tercapai dengan kriteria capaian Sangat Baik dan 3 indikator yang tidak tercapai sesuai target tetapi masih dalam Kriteria Tinggi dan Sedang.

Indikator tersebut antara lain Penurunan Jumlah Kematian Ibu dari yang ditargetkan 59 tetapi jumlah kematian meningkat menjadi 72 orang hal ini disebabkan masih tingginya bumil resti yang terlambat mendapat penanganan ketika dirujuk ke rumah sakit. Indikator ke dua yang tidak mencapai target adalah Prevalensi Balita Stunting yang ditargetkan turun mencapai 16% tetapi realisasi sebesar 18%, hal ini disebabkan capaian stunting pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target yang telah di tetapkan pada tahun 2022. Meskipun sebenarnya capaian stunting tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Penyebab lainnya penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita kurus dan Bumil KEK tidak dapat terlaksana oleh karena ada surat dari Kementerian Keuangan untuk henti salur (KMK Nomor : 24/KM.7/2022). Indikator ke tiga yang tidak mencapai target adalah Persentase kabupaten/kota sehat, dari yang ditargetkan 6 kabupaten (54,54%) hanya terealisasi 4 kabupaten (36,36%) hal ini disebabkan hanya 4 kabupaten/kota yang memenuhi prasyarat desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Dari hasil pengumpulan data, tingkat Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022 masuk **Kategori SANGAT BAIK (98,54%)**.

Tabel : 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2021 dan 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021	2022		Capaian (%)	Kriteria
			Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1:16	1 : 1,30	1 : 1,37	105%	Sangat Baik
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1:17.141	1 : 0,98	1 : 0,99	101%	Sangat Baik
2.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	67	59	72	81,94%	Tinggi
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	251	343	274	125,18%	Sangat Baik
		Prevalensi Balita Stunting	22,4	16	18	88,88%	Tinggi
3.	Menurunkan Angka esakitan Penyakit menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Menurunnya Angka esakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	36,36%	54%	36,36%	66,66%	Sedang
5.	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	81,72	73	81,72	111,94%	Sangat Baik

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021	2022		Capaian (%)	Kriteria
			Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	84,38	83	87	104,81%	Sangat Baik
	Rata – rata Kinerja					98,54%	Sangat Baik

Tabel : 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Awal RPJMD 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	2022			Target 2022 (RPJMD)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP TARGET RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1: 0,25	1: 1,30	1: 1,37	105%	1: 1,30	
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan		1: 0,98	1: 0,99	101%	1: 0,98	
2.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	62	59	72	81,94%	59	
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	353	343	274	125,18%	343	
		Prevalensi Balita Stunting	21,03%	16%	18%	88,88%	16	
3.	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	
		Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	36,36%	54%	36,36%	88,88%	54%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	2022			Target 2022 (RPJMD)	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP TARGET RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lingkungan							
5.	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	70,50%	73%	81,72%	111,94%	73%	
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	83%	87%	104,81%	83%	
	Rata – rata Kinerja					98,54		

Tabel : 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN NASIONAL 2022	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1 : 1	1 : 1,30	1 : 1,37	105%
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1:1	1 : 0,98	1 : 0,99	101%
2.	Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan stunting	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	null	59	72	81,94%
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	null	343	274	125,18%
		Prevalensi Balita Stunting	21,6	16	18	88,88%
3.	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	CAPAIAN NASIONAL 2022	2022		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		berpotensi bencana				
		Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase Kabupaten/Kota Sehat	50%	54%	81,81%	150%
5.	Meningkatnya tata kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh sistem informasi kesehatan	Persentase Capaian Nilai SAKIP	70	73	81,72	111,94%
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	87	104,81%
	Rata – rata Kinerja					98,54%

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

3.2.1. SASARAN 1	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan
-------------------------	---

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan”, dilakukan beberapa kegiatan dan program dengan indikator sebagai berikut :

Tabel : 3.5
Indikator Meningkatnya Kinerja Akses Pelayanan Kesehatan
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	Rasio Tempat Tidur per Jumlah Penduduk	1 : 1,30	1 : 1,37	105%
		Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1 : 0,98	1 : 0,99	101%

Rasio tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 1 : 1,37. Artinya Provinsi Jambi memiliki 1 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduknya. Dengan rincian per kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel : 3.6
Rasio Rumah Sakit per 1000 Penduduk Kabupaten/Kota
Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH SAKIT	TT	RASIO
1	2	3	4	5	6
1	Kerinci	251.911	-	-	-
2	Merangin	355.719	4	390	1,10
3	Sarolangun	293.600	2	268	0,91
4	Batanghari	306.718	2	241	0,79
5	Muaro Jambi	406.799	3	243	0,60
6	TanjungJabungTimur	231.772	1	109	0,47
7	TanjungJabung Barat	320.606	2	263	0,82
8	Tebo	340.868	2	170	0,50
9	Bungo	367.194	5	575	1,57
10	Kota Jambi	612.162	17	2.510	4,10
11	Kota Sungai Penuh	97.770	2	192	1,96
	Provinsi	3.585.119	40	4961	1,37

Kabupaten/kota yang memiliki rasio tempat tidur terbanyak adalah kota jambi yang mampu menyediakan 4 tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduknya. Sedangkan yang paling rendah rasionya adalah kabupaten tanjung jabung timur dengan rasio 0,47%, artinya tempat tidur rumah sakit tidak sampai 1 untuk 1000 penduduk.

Jumlah tempat tidur rumah sakit di provinsi jambi pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel : 3.7
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Provinsi Jambi
Tahun 2022

NO	NAMA RS	Desember 2022			TGL/BLN THN SK TT	JML TT DI SK	KETERANGAN
		tt covid 19	tt biasa	total tt			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RSUD RADEN MATTATHER	100	333	433	05-Okt-22	400	
2	RSJ	40	260	300	Feb-22	300	
3	RSUD HA THALIB KAB KERINCI	12	129	141			
4	RSUD ABUNDJANI KAB MERANGIN	9	174	183	06-Feb-23	181	
5	RSUD PROF DR CHATIB QUZWAIN KAB SAROLANGUN	22	140	162	Mar-22	156	
6	RSUD H.HANAFIE KAB BUNGO	78	212	290	15-Sep-22	219	
7	RSUD SULTAN THAHA SYAIFUDDIN KAB TEBO	2	139	141	09-Agu-22	146	
8	RSUD H ABDOEL MADJID BATOE KAB BT HARI	8	128	136	07/09/2022	136	
9	RSUD AHMAD RIPIN KAB.MA JAMBI	42	85	127	08-Apr-22	103	
10	RSUD SUNGAI BAHAR KAB MA JAMBI	15	51	66	06-Jan-23	51	
11	RSUD SEI GELAM KAB MA JAMBI	21	29	50			
12	RSUD DAUD ARIF KAB TANJAB BARAT	11	131	142	18-Jul-22	131	
13	RSUD SURYAH KHAIRUDDIN KAB TANJAB BARAT	25	96	121			
14	RSUD NURDIN HAMZAH KAB TANJAB TIMUR	14	95	109	01-Sep-22	109	
15	RSUD H ABDUL MANAP KOTA JAMBI	69	180	249	03-Jan-22	180	
16	RSU BHAYANGKARA KOTA JAMBI	59	143	202	11 Nov 21	199	
17	RSU BRATANATA KOTA JAMBI	30	164	194	01-Sep-22	194	
18	RSUD ABDURRAHMAN SAYUTI KOTA JAMBI	4	50	54	05-Jan-22	54	

NO	NAMA RS	Desember 2022			TGL/BLN THN SK TT	JML TT DI SK	KETERANGAN
		tt covid 19	tt biasa	total tt			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	RSU ST THERESIA KOTA JAMBI	20	80	100	26-Jul-22	100	
20	RSU SILOAM HOSPITAL KOTA JAMBI	20	88	108	10 Nov 2021	108	
21	RSIA ANNISA KOTA JAMBI	0	73	73	01-Jul-22	73	
22	RSU ISLAM ARAFAH KOTA JAMBI	9	92	101	09-Apr-22	101	
23	RSU KAMBANG KOTA JAMBI	10	111	121	31-Agu-22	111	
24	RSU RIMBO MEDIKA KOTA JAMBI	0	19	19			
25	RSU ROYAL PRIMA KOTA JAMBI	28	132	160	22-Sep-21	155	
26	RSU BAITURRAHIM KOTA JAMBI	4	95	99	27-Jun-22	100	
27	RSU ERNI MEDIKA KOTA JAMBI	0	54	54			
28	RSU MITRA KOTA JAMBI	13	89	102			
29	RSU MITRA MEDIKA KAB BT HARI	21	84	105			
30	RSU RAUDAH KAB MERANGIN	0	91	91			
31	RSIA PERMATA HATI KAB BUNGO	11	108	119	22-Des-21	118	
32	RSU ANDIMAS KAB MERANGIN	0	40	40	01-Jul-22	40	
33	RSU MERANGIN MEDICAL CENTER KAB MERANGIN	0	76	76			
34	RSU SETIA BUDI KAB TEBO	0	29	29			
35	RSU LANGIT GOLDEN MEDIKA KAB SAROLANGUN	0	106	106	03-Jan-22	108	
36	RSIA MOELIA KAB BUNGO	0	37	37	06-Jan-22	34	
37	RSU JABAL RAHMAH KAB BUNGO	0	79	79	06-Sep-21	75	
38	RSU MELATI KOTA SEI PENUH	0	51	51	06-Jan-23	55	
39	RSU RAFA THERESIA	30	111	141	25-Agu-22	116	
40	RSUD RANTAU IKIL KAB BUNGO	0	0	0			

Total tempat tidur rumah sakit yang paling banyak adalah RSUD Raden Mattaher dengan 433 jumlah tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Jiwa sebanyak 300 tempat tidur. Total tempat tidur yang paling sedikit adalah rumah sakit umum rimbo medika kota jambi dengan jumlah tempat tidur hanya 19 buah.

Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) harus memenuhi batas minimal 60%. Pada Tahun 2022, Rumah Sakit yang memenuhi standar SPA 60% sebanyak 30 Rumah Sakit dari 40 Rumah Sakit (75%). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan	Persentase Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	40 %	75%

Untuk melihat jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) batas minimal 60% dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Rumah Sakit				Lokasi	SPA
1	1571023	Rumah Sakit Tk.III 02.06.01 dr. Bratanata	C	TNI-AD	Kota Jambi	92,55
2	1571012	RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	B	Propinsi	Kota Jambi	91,32
3	1571147	RS Siloam Jambi	B	Swasta	Kota Jambi	90,88
4	1571162	RS Umum Kambang	C	Swasta	Kota Jambi	83,78
5	1509013	RS Umum Daerah H. Hanafie	B	Pemkab	Kab. Bungo	83,37
6	1571180	Rapha Theresia	C	Swasta	Kota Jambi	82,75
7	1502019	RS Merangin Medical Centre	D	Swasta	Kab. Merangin	80,75
8	1571158	H. Abdul Manap Kota Jambi	C	Pemkot	Kota Jambi	79,97
9	1571034	RS Bhayangkara Jambi	C	POLRI	Kota Jambi	79,79
10	1571163	RS BAITURRAHIM	C	Swasta	Kota Jambi	79,36
11	1509028	RS Umum Permata Hati	C	Swasta	Kab. Bungo	78,46
12	1504017	RS Royal Prima	C	Swasta	Kota Jambi	76,56
13	1571169	RS Umum Daerah H. Abdurrahman Sayoeti	D	Pemkot	Kota Jambi	75,31
14	1571136	RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	Khusus Jiwa B	Propinsi	Kota Jambi	75,14
15	1572003	Melati	D	Swasta	Kota Sungai Penuh	74,45
16	1508013	RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin	C	Pemkab	Kab. Tebo	73,77
17	1571045	RS Umum Santa Theresia	C	Swasta	Kota Jambi	73,50
18	1571159	RS Islam Arafah	C	Swasta	Kota Jambi	72,81
19	1507013	Suryah Khairuddin	D	Pemkab	Kab. Tanjung Jabung Barat	72,37
20	1506011	RS Umum Daerah Nurdin Hamzah	C	Pemkab	Kab. Tanjung Jabung Timur	71,33
21	1509031	Jabal Rahmah Medika	D	Swasta	Kab. Bungo	70,82

No.	Rumah Sakit				Lokasi	SPA
22	1505027	RS Umum Daerah Sungai Bahar	D	Pemkab	Kab. Muaro Jambi	69,59
23	1503039	RS Langit Golden Medika	C	Swasta	Kab. Sarolangun	67,56
24	1501012	RSU Daerah Mayjen H. A. Thalib	C	Pemkot	Kota Sungai Penuh	67,38
25	1504015	RS Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe	C	Pemkab	Kab. Batang Hari	66,51
26	1502014	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO	C	Pemkab	Kab. Merangin	65,05
27	1571161	RS Ibu dan Anak Annisa	Khusus Ibu & Anak C	Swasta	Kota Jambi	64,79
28	1504018	RS Mitra Medika Batang Hari	C	Swasta	Kab. Batang Hari	64,10
29	1507010	RS Umum Daerah KH. Daud Arif	C	Pemkab	Kab. Tanjung Jabung Barat	63,00
30	1571165	RS Umum Erni Medika	D	Swasta	Kota Jambi	62,79
31	1571168	RS Mitra Jambi (Mitra Hospital)	C	Swasta	Kota Jambi	60,13
32	1502015	RS Raudhah	C	Swasta	Kab. Merangin	58,34
33	1502018	Rumah Sakit Andimas	D	Swasta	Kab. Merangin	56,79
34	1509029	RS Ibu dan Anak Moelia	Khusus Ibu & Anak C	Swasta	Kab. Bungo	53,94
35	1571164	RSU RIMBO MEDIKA	D	Swasta	Kota Jambi	53,88
36	1505016	RS Umum Daerah Ahmad Ripin	C	Pemkab	Kab. Muaro Jambi	51,64
37	1503036	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain	C	Pemkab	Kab. Sarolangun	49,34
38	1505028	RS Umum Daerah Sungai Gelam	D	Pemkab	Kab. Muaro Jambi	48,49
39	1508002	Setia Budi	D	Swasta	Kab. Tebo	13,72
40	1509042	Rantau Ikil	D	Pemkab	Bungo	0,00

Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Akreditasi Rumah sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Dengan penerapan standar akreditasi mendorong perunahan pelayanan rumah sakit yang lebih berkualitas dan peningkatan Kerjasama antara disiplin profesi dalam perawatan pasien, yang dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.

Provinsi Jambi sampai tahun 2022 telah melaksanakan akreditasi rumah sakit sebanyak 34 rumah sakit dari 40 rumah sakit yang ada di provinsi jambi atau sekitar 85%, dengan rincian perkabupaten kota sebagai berikut :

Tabel : 3.8
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2022		Keterangan	
		Jumlah RS	Terakreditasi	Status	Belum Terakreditasi
1	2	3	4	5	6
1	Batang Hari	2	2	0	0
2	Muaro Jambi	3	3	0	0
3	Tanjab Barat	2	2	0	0
4	Tanjab Timur	1	1	0	0
5	Kota Jambi	15	12	0	3
6	Bungo	6	3	0	3
7	Tebo	2	2	0	0
8	Merangin	4	4	0	0
9	Sarolangun	2	2	0	0
10	Kerinci	1	1	0	0
11	Sungai Penuh	0	0	0	0
12	Provinsi	1	1	0	0
	JUMLAH	40	34	0	6

Dari 40 (empat puluh) Rumah Sakit di Provinsi Jambi, Rumah Sakit yang sudah terakreditasi sebanyak 34 Rumah Sakit dan 6 Rumah sakit belum terakreditasi. Rumah Sakit yang belum terakreditasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 3.9
Daftar Rumah Sakit Belum Terakreditasi Tahun 2022

No	Nama Rumah Sakit	Kelas	Pemilik	Kab / Kota	Provinsi
1	2	3	4	5	6
1	RS Umum Bersaudara Mandiri	D	Swasta	Bungo	JAMBI
2	RS Sentral Medika	D	Swasta	Kota Jambi	JAMBI
3	RS Umum Rimbo Medika	D	Organisasi Sosial	Kota Jambi	JAMBI
4	RS Ibu dan Anak Barkah	D	Swasta/Lainnya	Bungo	JAMBI
5	RS .Erni Medica	D	Swasta	Kota Jambi	JAMBI
6	RS. Rantau Ikil			Bungo	JAMBI

Tabel: 3.10
Rasio Puskesmas Per Kecamatan
Per Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK	PUSKESMAS	KEC	RASIO/KEC	RASIO/PDDK
1	2	3	4	5	6	7
1	KERINCI	251.911	21	16	1,31	2,50
2	MERANGIN	355.719	27	24	1,13	2,28
3	SAROLANGUN	293.600	16	10	1,60	1,63
4	BATANG HARI	306.718	18	8	2,25	1,76
5	MUARO JAMBI	406.799	22	11	2,00	1,62
6	TANJAB TIMUR	231.772	17	11	1,55	2,20
7	TANJAB BARAT	320.606	16	13	1,23	1,50
8	TEBO	340.868	20	12	1,67	1,76
9	BUNGO	367.194	19	17	1,12	1,55
10	KOTA JAMBI	612.162	20	11	1,82	0,98
11	KOTA SUNGAI PENUH	97.770	11	8	1,38	3,38
	JUMLAH	3.585.119	207	141	1,47	1,73

Pada tahun 2022 masih terdapat 2 Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas yaitu:

- Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dan
- Kecamatan Tanco Kabupaten Kerinci

Hal ini disebabkan belum mendapatkan lahan/tanah (proses hibah) untuk pembangunan puskesmas. Untuk memenuhi indikator ini maka pada tahun 2024 akan diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk dibangun Puskesmas di 2 wilayah Kecamatan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan program upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maka setiap Puskesmas diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi.

Selain Rasio Puskesmas perlu juga kami gambarkan puskesmas terakreditasi tahun 2022 . Seperti diketahui bahwa tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap system manajemen, system manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen resiko. Tahun 2022 indikator minimal 1 puskesmas setiap kecamatan yang terakreditasi di wilayah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Cakupan Kecamatan yang Mempunyai Puskesmas Terakreditasi
Per Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN MEMPUNYAI PUSKESMAS TERAKREDITASI	PERSENTASE KECAMATAN MEMPUNYAI PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	2	3	4	5
1	KERINCI	16	15	93,75
2	MERANGIN	24	22	91,67
3	SAROLANGUN	10	10	100
4	BATANGHARI	8	8	100
5	MUARO JAMBI	11	11	100
6	TANJAB TIMUR	11	11	100
7	TANJAB BARAT	13	13	100
8	TEBO	12	12	100
9	BUNGO	17	17	100
10	KOTA JAMBI	11	11	100
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	8	100
	TAHUN 2022	141	138	97,87

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah kecamatan mempunyai puskesmas terakreditasi sebanyak 138 dari 141 kecamatan (97,87%). Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 135 Kecamatan. Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka masih ada 2 kabupaten/kota yang kecamatannya belum mencapai 100% untuk kecamatan yang mempunyai puskesmas terakreditasi yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Pada tahun 2022 pelaksanaan akreditasi puskesmas baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan dikarenakan sebagai berikut :

- Adanya surat edaran penundaaan survey akreditasi puskesmas disebabkan pandemic covid tahun 2020 – 2022
- Adanya Revisi Permenkes No. 46 tahun 2015 Adanya revisi Permenkes No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
- Belum adanya standar untuk pelaksanaan survey akreditasi Puskesmas.
- Belum terbentuknya Lembaga untuk survei akreditasi Puskesmas

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, FKTP yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar Sarana, Prasarana dan Alat

Kesehatan (SPA) harus memenuhi batas minimal 60%. Pada Tahun 2022, Puskesmas yang memenuhi standar SPA 60% sebanyak 120 Puskesmas dari 207 Puskesmas (57,97%). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Penyediaan fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan	Persentase FKTP mempunyai Sarana Prasarana Alat kesehatan dan pelayanan sesuai Standar	50 %	57,97%

Untuk melihat jumlah puskesmas yang telah memenuhi standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) batas minimal 60% berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Puskesmas per Kabupaten /Kota dalam Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Treshold 60%)

No	Nama Wilayah	Jumlah Puskesmas	Capaian 2021	Capaian 2022	% 2021	% 2022
1	Kab. Kerinci	21	8	10	38.10	47.62
2	Kab. Merangin	27	10	11	37.04	40.74
3	Kab. Sarolangun	16	6	7	43.75	43.75
4	Kab. Batang Hari	18	7	8	44.44	44.44
5	Kab. Muaro Jambi	22	19	19	86.36	86.36
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	17	10	11	58.82	64.71
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	16	8	9	50.00	56.25
8	Kab. Tebo	20	8	9	45.00	45.00
9	Kab. Bungo	19	10	10	52.63	52.63
10	Kota Jambi	20	18	19	95.00	95.00
11	Kota Sungai Penuh	11	8	8	72.73	63.64
	Provinsi Jambi	207	112	120	54.11	57.97

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pemenuhan SPA Puskesmas dari Tahun 2021 sebesar 54,11% menjadi 57,97% pada Tahun 2022. Namun demikian, bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, terdapat 1 (satu) kota yang mengalami penurunan yaitu Kota Sungai Penuh.

3.2.2. SASARAN 2**Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting**

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “ Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Stunting” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program Kesehatan Ibu dan Anak. Adapun hasil yang dilakukan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran

Angka kematian ibu AKI di Indonesia masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa decade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Data terakhir AKI masih 306/100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS 2015). Untuk mendapatkan capaian indikator terkait Angka Kematian Ibu (AKI) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Provinsi Jambi untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran tidak bisa dihitung karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai 100.000. Pada tahun 2022 jumlah kelahiran hidup hanya 64.451 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
		2021	2022
1	Kerinci	4	7
2	Merangin	8	6
3	Sarolangun	4	6
4	Batang Hari	9	9
5	Bungo	8	7
6	Tebo	12	9
7	Muaro Jambi	9	8
8	Tanjab Barat	5	5
9	Tanjab Timur	7	5
10	Kota Jambi	6	7
11	Kota Sei Penuh	3	3
	PROVINSI	75	72

Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu di provinsi jambi sebanyak 72 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus kematian ibu di tahun 2021, jumlah kasus kematian ibu tahun 2022 ini mengalami penurunan. Tetapi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 59 kasus maka tidak mencapai target hal ini disebabkan Lemahnya pengawasann secara intensif paa kasus komplikasi; Penanganan sistim rujukan yang relative masih lemah atau belum sesuai standar; Lemahnya

SOP puskesmas dalam penanganan komplikasi kegawat daruratan maternal neonatal; Lemahnya standar pelayanan di fasilitas rujukan dan Terbatasnya SDM/ kemampuan SDM kedaruratan di fasilitas kesehatan.

Pada tahun 2022 penyebab kematian ibu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.14
Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Wilayah	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Ibu								
			Perdarahan	Hipertensi	Infeksi	Abortus	Gangguan Darah	Gangguan Metabolik	Jantung	COVID-19	Lain2
1	KERINCI	7	3	2	0	0	0	0	0	0	2
2	MERANGIN	6	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	SAROLANGUN	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5
4	BATANGHARI	9	2	2	1	0	0	0	2	2	0
5	MUARO JAMBI	8	1	5	0	0	0	0	0	1	1
6	TANJUNG JABUNG BARAT	5	1	3	0	0	0	0	1	0	0
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0
8	BUNGO	9	2	3	1	0	0	0	3	0	0
9	TEBO	7	0	2	0	0	0	0	0	0	5
10	KOTA JAMBI	7	2	0	0	0	0	0	2	0	3
11	KOTA SUNGAI PENUH	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		72	16	19	2	0	0	0	12	3	20

Dari tabel diatas dapat dilihat penyebab kematian terbanyak adalah Lain-lain sebanyak 20 orang (27,7%), kemudian Hipertensi sebanyak 19 orang (26,38%), Perdarahan sebanyak 16 orang (22,2%), Jantung 12 orang (16,6%) dan infeksi sebanyak 2 orang (2,7%) dan Covid-19 sebanyak 3 orang (4,16%)

Adapun langkah strategis kedepan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan TIM AMP (Audit Maternal Perinatal) di Dinas kesehatan yang mendampingi di semua puskesmas.
- 2) Optimalisasi Media Sosial (Wa grup Ibu hamil) di wilayah kerja puskesmas, untuk meningkatkan kesadaran ibu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan.

Cakupan pelayanan ibu hamil (K4) adalah : Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4x.

Persalinan oleh tenaga Kesehatan adalah : ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 3.15
Cakupan Kunjungan Antenatal (K4) dan Persentase Persalinan di Faskes
Di Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	Wilayah	IBU HAMIL	Cakupan Kunjungan Antenatal (K4) Cakupan Kunjungan ANC		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) %	
			ABS	%	ABS	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Kerinci	3.597	3.536	98,30%	3.410	99,30%
2	Merangin	7.570	6.308	83,33%	5.170	71,55%
3	Sarolangun	6.366	6.042	94,91%	5.534	91,08%
4	Batanghari	5.352	4.674	87,33%	4.382	85,79%
5	Muaro Jambi	8.950	6.955	77,71%	6.745	78,95%
6	Tanjung Jabung Barat	6.702	5.748	85,77%	4.792	74,90%
7	Tanjung Jabung Timur	3.666	3.520	96,02%	2.677	76,51%
8	Bungo	7.767	6.572	84,61%	6.143	82,86%
9	Tebo	6.965	6.139	88,14%	5.805	87,31%
10	Kota Jambi	10.425	11.237	107,79%	10.774	108,27%
11	Kota Sei Penuh	1.445	1.334	92,32%	1.314	95,22%
	TOTAL	68.805	62.065	90,20%	56.746	86,40%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Cakupan Kunjungan Antenatal (K4) dari 68.805 jumlah ibu hamil di peroleh ANC 62.065 atau 90,20 % hal ini telah melampaui target tahun 2022 yaitu 90%. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan tahun 2022 mencapai 86,40%, capaian ini belum sesuai target tahun 2022 yaitu 91%. Hal ini disebabkan data masih dalam proses penginputan.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Indonesia masih cukup tinggi, data terakhir AKB 24 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2017) Untuk mendapatkan capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Hasil Survey untuk Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran belum ada hasil yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Untuk menjawab indikator ini, kami akan menampilkan tabel seperti dibawah ini.

Tabel 3.16
Jumlah Kematian Bayi (Umur 0 – 11 Bulan) Di Provinsi Jambi
Tahun 2022

NO.	KAB/KOTA	TAHUN		KET
		2021	2022	
1	Kerinci	40	47	
2	Merangin	45	25	
3	Sarolangun	19	19	
4	Batang Hari	33	28	
5	Bungo	32	19	
6	Tebo	40	52	
7	Muaro Jambi	33	19	
8	Tanjab Barat	16	5	
9	Tanjab Timur	39	37	
10	Kota Jambi	7	11	
11	Kota Sei Penuh	2	12	
PROVINSI		306	274	

Sumber : Seksi Kesga Dinkes

Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 274 bayi, hal ini telah melampaui target tahun 2022 yaitu 343 bayi. Jika kita bandingkan dengan kasus tahun 2021 sebanyak 306 bayi maka tahun 2022 ini mengalami penurunan kasus. Kasus tertinggi terdapat pada kabupaten tebo sebanyak 52 bayi dan paling rendah kabupaten tanjung jabung barat hanya 5 bayi.

Dilihat dari jumlah kematian neonatal 0-6 hari meninggal 209 bayi, bayi yang berumur 7-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 49 bayi, sedangkan yang berumur 0-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 258 bayi. Penyebab kematian terbanyak BBLR 114 bayi dan asfiksia sebanyak 41 bayi, infeksi 5 bayi, kongenital 24 bayi, dan lain-lain 71 bayi. Untuk lebih lengkapnya data kematian pada bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Jumlah Kematian Neonatal Tahun 2022

NO	Wilayah	Jumlah Lahir Mati	Kematian Neonatal			Jumlah Kematian Bayi (0 sd 11 Bulan)
			0-6 hari	7-28 hari	0-28 hari	
			1	2	3	
1	KERINCI	32	31	11	42	47
2	MERANGIN	27	21	2	23	25
3	SAROLANGUN	12	16	3	19	19
4	BATANG HARI	16	25	2	27	28
5	MUARO JAMBI	10	17	1	18	19
6	TANJUNG JABUNG TIMUR	26	27	9	36	37
7	TANJUNG JABUNG BARAT	21	3	2	5	5
8	TEBO	17	41	11	52	52
9	BUNGO	6	10	5	15	19
10	JAMBI	1	10	1	11	11
11	SUNGAI PENUH	4	8	2	10	12
TOTAL		172	209	49	258	274

Pada tahun 2019, pencatatan dan pelaporan kematian ibu, kematian bayi, kematian balita masih menggunakan manual. Sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 pencatatan dan pelaporan kematian ibu, bayi, balita menggunakan aplikasi Maternal Death Notifikasi (MDN), Neonatal Perinatal Death Notifikasi (NPDN) adalah aplikasi pelaporan kematian maternal dan perinatal yang cepat dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi informatika terkini dengan tujuan mendapat laporan kematian ibu, bayi, balita sedini mungkin dengan data yang akurat dan di sertai dengan analisis statistic sederhana guna meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan bersumber data agar dapat di gunakan di berbagai lapisan tenaga kesehatan (aplikasi bisa di gunakan daerah perkotaan daerah terpencil menggunakan internet, wifi dan SMS yang terjangkau sinyal SMS seluler).

Tabel 3.18
Jumlah Kematian Balita Tahun 2022

No.	Wilayah	Jumlah Kematian Anak Balita 1 sd 4 Tahun	Jumlah Kematian Balita 0 sd 4 Tahun	Penyebab Kematian Anak Balita						
				Pneumonia	Demam Berdarah	Kel. Kongenital Jantung	Kecelakaan lalu lintas	Kel. Kongenital lainnya	Tenggelam	Lain2
1	KERINCI	3	50	1	0	1	0	0	0	1
2	MERANGIN	1	25	0	0	0	0	1	0	0
3	SAROLANGUN	0	19	0	0	0	0	0	0	0
4	BATANGHARI	0	26	0	0	0	0	0	0	0
5	MUARO JAMBI	0	20	0	0	0	0	0	0	0
6	TANJUNG JABUNG BARAT	0	37	0	0	0	0	0	0	0
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	5	10	0	0	0	0	0	0	5
8	BUNGO	0	52	0	0	0	0	0	0	0
9	TEBO	3	20	1	0	0	1	0	1	0
10	KOTA JAMBI	5	14	0	3	1	0	0	0	1
11	KOTA SUNGAI PENUH	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	PROVINSI	17	283	2	3	2	1	1	1	7

Pada tabel diatas dapat di lihat jumlah kematian anak balita usia 1 s/d 4 tahun sebanyak 17 balita dan jumlah kematian anak usia 0 s/d 4 tahun sebanyak 283 balita. Di lihat dari jumlah kematian balita, penyebab kematian balita di sebabkan oleh Pneumonia 2 balita, demam berdarah 3 balita, kelainan congenital jantung 2 balita , kecelakaan lalu lintas 1 balita, kelainan congenital lainnya 1 balita, tenggelam 1 balita dan lain – lain sebanyak 7 balita.

Tabel 3.19
Persentase Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2022

NO	Wilayah	Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	
			ABS	%
1	2	3	4	5
1	Kerinci	3.270	3.536	98,30%
2	Merangin	6.882	6.308	83,33%
3	Sarolangun	5.787	6.042	94,91%
4	Batanghari	4.865	4.674	87,33%
5	Muaro Jambi	8.136	6.955	77,71%
6	Tanjung Jabung Barat	6.093	5.748	85,77%
7	Tanjung Jabung Timur	3.333	3.520	96,02%
8	Bungo	7.061	6.572	84,61%
9	Tebo	6.332	6.139	88,14%
10	Kota Jambi	9.477	11.237	107,79%
11	Kota Sei Penuh	1.314	1.334	92,32%
	TOTAL	62.550	62.065	90,20%

Dari data yang di peroleh diatas bahwa Persentase Bayi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan tahun 2022 sebesar 90,20%, capaian ini sudah melebihi target tahun 2022 yaitu 90%.

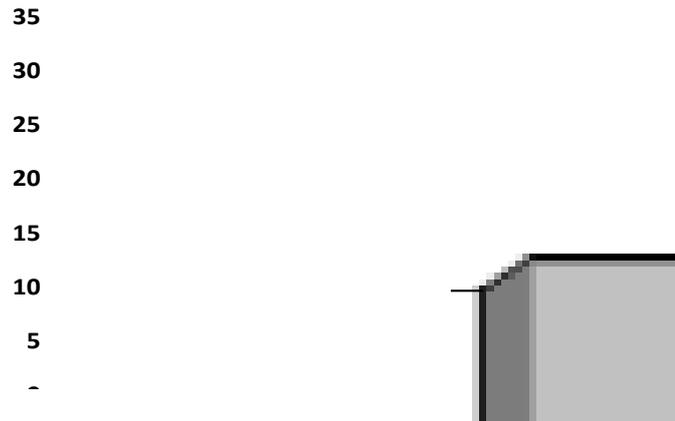
3. Prevalensi Balita Stunting

Tabel 3.20
Indikator Prevalensi Balita Stunting Tahun 2022

	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
	Balita	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16 %	18% (SSGI,2022)	88,88 %
	Balita	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk pada balita	7,8 %	6,6% (SSGI,2022)	118,18%

Prevalensi stunting pada balita ditargetkan bisa turun mencapai 16% pada tahun 2022, realisasi yang telah dicapai sebesar 18% (SSGI, 2022). Capaian penurunan prevalensi masalah sebesar 88,88%. Penurunan prevalensi stunting membutuhkan peran masyarakat dan pemerintah yang terkoordinasi, reintegrasi dan konvergen yang diwujudkan dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Sektor Kesehatan berkontribusi dalam upaya spesifik, yang mana berdasarkan kajiannya hanya bisa mengungkit perubahan sebesar 30%, sisanya harus dilakukan upaya sensitif yaitu di luar sector kesehatan yang berupa perbaikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kejadian stunting.

Prevalensi Wasting pada balita ditargetkan bisa diturunkan menjadi 7,8%, realisasi yang telah dicapai sebesar 6,6% (SSGI, 2022). Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian 118,18%. Penurunan prevalensi wasting sama seperti penurunan stunting butuh upaya yang melibatkan semua pihak. Balita gizi kurang mendapatkan makanan tambahan untuk pemulihan selama 90 hari makan, bisa berupa makanan lokal ataupun makanan pabrikan. Balita gizi buruk 100% mendapatkan perawatan berupa rawat inap atau pun rawat jalan.



Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa permasalahan stunting cenderung turun mendekati target yang diharapkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada masalah wasting cenderung turun melebihi target yang diharapkan pada tahun 2022.

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional Tahun 2022

No.	Indikator	Capaian Nasional 2022	Capaian Perangkat Daerah Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	21,6% (SSGI,2022)	16 %	18% (SSGI,2022)	88,88 %
2.	Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk pada balita	7,7% (SSGI,2022)	7,8%	6,6% (SSGI,2022)	118,18%

Permasalahan gizi di Provinsi Jambi hampir sama dengan kondisi Nasional. Prevalensi stunting dan wasting di Provinsi Jambi bila dibandingkan dengan capaian Nasional berada diatas Nasional.

Tabel 3.21
Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Per Kabupaten/Kota
Tahun 2013, 2018, 2019, 2021 dan 2022

NO	KAB/KOTA	RISKESDAS		SSGBI		
		2013	2018	2019	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Kerinci	55,3	42,2	33,85	26,7	24,2
2	Merangin	37,5	35	15,38	19,7	14,5
3	Sarolangun	40,8	18,8	19,06	21,4	16,8
4	Batanghari	39,5	32,8	27,32	24,5	26,6
5	Muaro Jambi	50	20,7	13,51	27,2	18,6
6	Tanjung Jabung Timur	48,5	40,9	20,05	25,6	22,5
7	Tanjung Jabung Barat	29,6	44	21,81	19,8	9,9
8	Tebo	41,4	33	30,13	26,2	25
9	Bungo	34,5	20,7	27,57	22,9	15,4
10	Kota Jambi	24,6	26,2	18,62	17,4	14
11	Kota Sei Penuh	36,9	35,8	25,66	25,0	26
	TOTAL	37,2	30,1	21,03	22,4	18

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 – 2018, prevalensi balita stunting di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 37,2 menjadi 30,1%. Tahun 2019 – 2022 berdasarkan SSGBI prevalensi balita stunting di Provinsi Jambi mengalami penurunan dan kenaikan prevalensi, yaitu tahun 2019 prevalensi sebesar 21,03%, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 22,4% dan tahun 2022 mengalami penurunan Kembali menjadi 18%. Jika dilihat per kabupaten/kota prevalensi stunting tertinggi di kabupaten batang hari 26,6%, diikuti oleh kota sungai penuh 26%, kabupaten tebo 25% dan kabupaten kerinci 24,2%. Prevalensi yang paling kecil adalah kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 9,9%.

3.2.3. SASARAN	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular
-----------------------	--

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Adapun hasil yang dilakukan selama ini untuk mendukung Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana; dan Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)

1. Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatra yang terkenal dengan iklim tropis, namun juga menjadi kerentanan terjadinya perubahan iklim seperti kenaikan temperatur , perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan, kenaikan muka air laut yang dapat mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan IRBI tahun 2013 menyatakan bahwa 8 dari 11 Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jambi berisiko tinggi mengalami bencana, dan 3 lainnya berisiko sedang mengalami bencana. Jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi Jambi diantaranya banjir, gempa bumi, angin puting beliung, banjir bandang, erupsi gunung berapi, tanah longsor, konflik sosial, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan, KLB penyakit dan yang lainnya.

Tabel 3.22
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2021 s/d tahun 2022

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN		KET
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1	Kebakaran Pemukiman	2	20	
2	Karhutla	-	-	
3	Angin Puting Beliung	2	1	
4	Banjir	3	7	
5	Longsor	-	1	
6	Angin Kencang	-		
7	Erupsi Gunung	-		
8	Gempa Bumi	-		
9	Banjir Bandang	-		
10	Lahar Dingin	-		
11	Banjir ROB	-		
12	Abrasi	-		
	JUMLAH	7	29	

Pada tahun 2022 ada 4 (empat) kejadian bencana yaitu kebakaran pemukiman, angin puting beliung, banjir dan longsor. Kejadian yang paling banyak adalah kebakaran pemukiman yang berdampak pada 466 jiwa.

Tabel 3.23
Rekapitulasi Kejadian Krisis Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Terdampak		Keterangan
			KK	Jiwa	
1	Kebakaran Pemukiman	20	133	466	
2	Angin Puting Beliung	1	1.886	6.500	
3	Banjir	7	5.613	22.180	
4	Covid 19	11		39.408	
	Total	39	7.637	68.554	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kejadian Krisis Kesehatan di Provinsi Jambi yang paling banyak berdampak pada masyarakat adalah bencana covid 19 berdampak kepada masyarakat sebanyak 39.408 jiwa; bencana banjir dari 7 kejadian bencana banjir berdampak pada masyarakat sebanyak 5.613 KK dan 22.180 Jiwa; selanjutnya angin putting beliung berdampak pada 1.886 KK dan 6.500 Jiwa; selanjutnya Kebakaran pemukiman 133 KK dan 466 jiwa.

Tabel 3.24
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Di Provinsi Jambi Tahun 2022

Target yang Harus Dilayani	Jumlah Yang terlayani	Yang Belum Terlayani	%	Ket
57.204	68.554	0	100	

Pada Tabel 3.24 diatas terlihat persentase penduduk yang terlayani akibat bencana sebesar 100% .

Tabel 3.25
Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Kabuapten/kota Tahun 2022

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Krisis Kesehatan			
				Jenis Bencana	Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan	Penduduk Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	KEBAKARAN PEMUKIMAN				466	466	100
1	Kota Jambi	Kec. Jelutung	Kel.Jelutung RT 13 Payo Lebar	Kebakaran Pemukiman	16	16	100
		Kec.Pelayangan	Kel.Tahyatul Yaman	Kebakaran Pemukiman	16	16	100
		Kec.Danau Sipin	Kel. Solok Sipin RT.04	Kebakaran Pemukiman	50	50	100
		Kec.Jambi Timur	Kel. Kasang rt 03	Kebakaran Pemukiman	8	8	100
		Kec. Alam Barajo	Kel. Bagan Pete jl.Sari Bakti rt 09	Kebakaran Pemukiman	8	8	100
		Kec. Jambi Timur	Kel. Payo silincah rt 09	Kebakaran Pemukiman	3	3	100
		Kec.Jambi Timur	Kel. Sijinjang rt 07	Kebakaran Pemukiman	7	7	100
		Kec. Jambi Timur	Kel. Kasang	Kebakaran Pemukiman	12	12	100
2	Kab. Tanjab Barat	Kec.Tungkal Ilir	Kel.Tungkal 4 Kota	Kebakaran Pemukiman	40	40	100
		Kec.Tungkal Ilir	Kel.Tungkal Harapan	Kebakaran Pemukiman	62	62	100
		Kec.Kuala Betara	Desa Betara Kiri	Kebakaran Pemukiman	3	3	100
		Kec. Pengabuan	Kel. Teluk Nilau RT 02	Kebakaran Pemukiman	21	21	100
		Kec.Tungkal Ilir	Kel. Tungkal Harapan rt 19 dan 08	Kebakaran Pemukiman	46	46	100
		Kec.Tungkal Ilir	Kel. Tungkal III	Kebakaran Pemukiman	36	36	100
		Kec.Betara	Desa Pematang Lumut	Kebakaran Pemukiman	5	5	100
		Kec.Tungkal Ilir	Kel. Tungkal III	Kebakaran Pemukiman	17	17	100
		Kec.Tungkal Ilir	Kel. Patunas	Kebakaran Pemukiman	17	17	100
3	Kab. Tebo	Kec.Rimbo Bujang	Desa Tegal Arum Komp.Pasar	Kebakaran Pemukiman	73	73	100
4	Kab. Tanjab Timur	Kec.Mendahara	Desa Mendahara Tengah	Kebakaran Pemukiman	23	23	100
5	Kab. Kerinci	Kec. Kayu Aro	Kel. Koto Tengah	Kebakaran Pemukiman	3	3	100
B	BANJIR				22.180	22.180	100
1	Kab. Bungo	12 Kecamatan	28 Desa	Banjir	12.109	12.109	100
		Kec.Rantau Pandan	Dusun Duku Leban				

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Krisis Kesehatan			
				Jenis Bencana	Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan	Penduduk Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kec. Pelepat	Desa Bukit Telago				
		Kec. Pelepat Ilir	Desa Muaro Kuamang				
			Desa Padang Palangeh				
			Desa Lubuk Danau				
		Kec. Bathin II Babeko	Desa Tanjung Menanti				
		Kec. Muko-muko Bathin VII	Dusun Bedaro				
		Kec. Bungo Dani	Desa Sungai Pinang				
			Desa Talang Pantai				
		Kec. Pasar Muara Bungo	Kel. Jaya Setia				
			Kel. Tanjung Gedang				
			Kel. Batang Bungo				
			Kel. Bungo Timur				
		Kec. Bathin III	Kel. Manggis				
			Kel. nBungo Taman Agung				
			Kel. Purwobakti				
			Kel. Air Gemuruh				
		Kec. Tanah Sepenggal	Desa Tanah Bekali				
			Desa Candi				
			Desa Tenam				
			Desa Sungai Gambir				
			Desa Rantau Embacang				
		Kec. Jujuhan	Desa Pulau Jelmu				
			Desa Tanjung Belit				
			Desa Ujung Tanjung				
		Kec. Jujuhan Ilir	Desa Tepian Danto				
			Desa Jambak				
		Kec. Tanah Tumbuh	Desa Renah Jelmu				
2	Kab. Tebo	Kec. Rimbo Bujang	Desa Tirta Kencana	Banjir	6.500	6.500	100
3	Kota Jambi	Kec. Kota Baru	Kel. Pal V RT 04, 27, 29, 31	Banjir	1.134	1.134	100
		Kec. Kota Baru	Kel. Pal V RT 08, 19	Banjir	194	194	100
4	Kab. Sarolangun	Kec. Limun	3 Desa	Banjir	336	336	100
			Desa Demang				
			Desa Muaro Limun				
			Desa Pulau Pandan				
		Kec. Sarolangun	4 Kelurahan	Banjir	1.253	1.253	100
			Kelurahan Pasar,				
			Desa Lindung				
			Desa Ladang Panjang				
			Desa PI Pinang				
5	Kab. Muaro Jambi	Kec. Mestong	Desa Nyogan	Banjir	654	654	100

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Krisis Kesehatan			
				Jenis Bencana	Sasaran Penduduk Penerima Pelayanan Kesehatan	Penduduk Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	ANGIN PUTING BELIUNG				6.500	6.500	100
1	Kab. Tebo	Kec. Rimbo Bujang	Desa Tirta Kencana	Angin Puting Beliung	6.500	6.500	100
D	COVID-19				39.408	39.408	100
1	Kerinci	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	643	643	100
2	Merangin	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	2.001	2.001	100
3	Sarolangun	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	1.430	1.430	100
4	Batang Hari	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	3.809	3.809	100
5	Muaro Jambi	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	5.823	5.823	100
6	Tanjab Barat	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	3.153	3.153	100
7	Tanjab Timur	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	1.668	1.668	100
8	Bungo	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	2.504	2.504	100
9	Tebo	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	2.493	2.493	100
10	Kota Jambi	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	14.337	14.337	100
11	Kota Sungai Penuh	Semua Kecamatan	Semua Desa /Kel	Pandemi Covid-19	1.547	1.547	100
TOTAL					68.554	68.554	100

2. Menurunnya Angka Kesakitan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan sistem atau tools untuk memantau terjadi atau tidaknya peningkatan kasus dari suatu penyakit terutama penyakit yang berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa).

Untuk pelaksanaan Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) berbasis Puskesmas yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi pada enam tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2022 di peroleh hasil sebagai berikut :

a. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

Indikator target kinerja Nasional adalah persentase sinyal kewaspadaan dini direspon <24 jam sebesar 90%, di Provinsi Jambi situasi sistem kewaspadaan dini penyakit potensial KLB pada tahun 2022 telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98%, untuk lebih jelasnya terlihat pada table 3.24 dibawah ini:

Tabel 3.26
Situasi Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	KAB./KOTA	JMLH PERINGATAN DINI PENYAKIT DI UNIT PELAPOR		JUMLAH		KETEPATAN * (%)	KELENGKAPAN * (%)	ALERT YANG DIRESPON *		
		M-52 2022	TOT *	Unit	KEC			Jumlah	KLB	24 Jam
1	KAB. BATANG HARI	1	74	19	8	83.60	94.74	74		74
2	KAB. BUNGO		44	20	17	95.96	99.81	44		44
3	KAB. KERINCI		37	21	16	95.33	99.54	37		33
4	KAB. MERANGIN	1	43	28	24	98.97	99.86	43	3	42
5	KAB. MUARO JAMBI		61	23	11	98.33	100	61		61
6	KAB. SAROLANGUN		28	17	10	86.76	95.93	27	2	27
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	1	54	17	13	99.55	99.89	54		54
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	3	88	18	11	99.15	100	88		88
9	KAB. TEBO	2	92	21	12	95.15	99.63	89		88
10	KOTA JAMBI	15	546	24	11	100	100	546	9	544
11	KOTA SUNGAI PENUH	3	79	12	9	93.27	97.60	76		71
INDONESIA		26	1146	220	142	95.10	98.82	1139	14	1126

a) Ketepatan Laporan

Tabel 3.27
Ketepatan Laporan SKDR Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2021 dan 2022

NO	KAB/KOTA	2021	2022	KET
1	Batang Hari	87	83,60	
2	Bungo	94	95,96	
3	Kerinci	88	95,33	
4	Merangin	100	98,97	
5	Muaro Jambi	98	96,33	
6	Sarolangun	94	86,76	
7	Tanjab Barat	99	99,55	
8	Tanjab Timur	99	99,15	
9	Tebo	84	95,15	
10	Kota Jambi	100	100	
11	SUNGAI PENUH	85	93,27	
	PROVINSI	93.4	95,10	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk ketepatan laporan secara umum untuk Provinsi Jambi tahun 2022 rata-rata sudah melampaui target yang telah ditetapkan secara nasional (80%). Cakupan ketepatannya yang paling tinggi adalah kota jambi sebesar 100% dan yang paling rendah kabupaten batang hari 83,60%. Jika di dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2022 ini sebesar 1,7%.

b) Kelengkapan Laporan

Tabel 3.28
Kelengkapan Laporan SKDR Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2021 dan 2022

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	Batang Hari	98	94,74	
2	Bungo	99	99,81	
3	Kerinci	98	99,54	
4	Merangin	100	99,86	
5	Muaro Jambi	100	100	
6	Sarolangun	99	95,93	
7	Tanjab Barat	100	99,89	
8	Tanjab Timur	100	100	
9	Tebo	85	99,63	
10	Kota Jambi	100	100	
11	Sungai Penuh	91	97,60	
	PROVINSI	97	98,82	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk kelengkapan laporan secara umum untuk Provinsi Jambi dari tahun 2022 cakupan rata-rata sudah melampaui target yang telah ditetapkan secara nasional (85%). Kabupaten/Kota yang cakupan dari kelengkapan laporannya paling tinggi adalah kabupaten muaro jambi, kabupaten tanjung jabung timur dan kota jambi yang cakupannya 100%. Kabupaten yang paling rendah cakupannya dari kelengkapan laporannya adalah kabupaten batang hari.

c) Jumlah ALERT (Peringatan Dini).

Tabel 3.29
Daftar Jumlah Alert yang muncul dan jumlah Alert yang di verifikasi Per Kabupaten/ Kota dari tahun 2021 dan 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		KET
		JLH ALERT	DIRESPO<24 JAM	JLH ALERT	DIRESPO<24 JAM	
1	2	3	4	5	6	7
1	Batang Hari	22	22	74	74	
2	Bungo	25	25	44	44	
3	Kerinci	26	26	37	33	
4	Merangin	19	19	43	42	
5	Muaro Jambi	43	43	61	61	
6	Sarolangun	5	5	27	27	
7	Tanjab Barat	22	21	54	54	
8	Tanjab Timur	33	33	88	88	
9	Tebo	19	19	89	88	
10	Kota Jambi	93	92	544	544	
11	Kota Sungai Penuh	0	0	71	71	
	PROVINSI	307	305	1139	1126	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah Alert yang muncul 1.139 dan mendapat respon <24 jam 1.126. Jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021 jumlah alert yang muncul dan telah diverifikasi mengalami peningkatan. Akan tetapi khusus untuk Kota Sungai Penuh untuk tahun 2021 tidak terdapat adanya alert yang muncul.

b. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pada tahun 2022 Penanggulangan KLB yang dilakukan oleh Tim KLB Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang penanggulangan KLB adalah penyelidikan KLB, upaya pengobatan penderita dan pencegahan perluasan KLB serta surveilans ketat. Pentahapan penyelidikan dan penanggulangan KLB yang sudah dilakukan oleh Sie P3 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan atau memastikan Diagnosis
2. Memastikan terjadinya KLB
3. Menghitung jumlah kasus/angka insiden yang tengah berjalan

4. Menggambarkan karakteristik KLB
5. Mengidentifikasi sumber dari penyebab penyakit dan cara penularannya
6. Mengidentifikasi populasi yang mempunyai peningkatan resiko infeksi
7. Melaksanakan tindakan penanggulangan dalam rangka mencegah perluasan terjadinya KLB

Tabel 3.30
Frekuensi dan CFR KLB pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2021-2022

No	Kab/ Kota	2021				2022			
		Frek	Jml Kasus	Jml Kematian	CFR (%)	Frek	Jml Kasus	Jml Kematian	CFR (%)
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10
1	Kerinci	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kt Sei. Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Merangin	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Sarolangun	0	0	0	0	1	112	0	0
5	Bungo	0	0	0	0	1	8	0	0
6	Tebo	0	0	0	0	2	199	0	0
7	Batang Hari	0	0	0	0	1	1	0	0
8	Ma. Jambi	1	2	1	50	5	86	0	0
9	Tanjab Barat	0	0	0	0	2	22	0	0
10	Tanjab Timur	0	0	0	0	1	24	0	0
11	Kota Jambi	0	0	0	0,00	4	63	0	0,00
Total		2	3	1	33,33	17	515	0	0,00

Tabel 3.31
Kejadian Luar Biasa Berdasarkan Jenis Penyakit
di Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Penyakit	Frekuensi	Jumlah Kasus	Meninggal Dunia	CFR
1	Campak	4	187	0	0
2	Rubela	1	10	0	
3	Pertusis	5	6	0	
4	Hepatitis A	3	32		
5	Keracunan Pangan	2	280	0	
Jumlah		15	515	0	0,00

Berdasarkan Tabel 3.28 diatas terjadi peningkatan jumlah KLB dari 3 kasus KLB (2021) menjadi 515 kasus KLB (2022). Peningkatan kasus terjadi pada tahun 2022 didominasi oleh kasus keracunan pangan, campak dan hepatitis A

3.2.4. SASARAN 4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
-------------------------	--

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan kegiatan sebagai berikut :

Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat & pemerintah daerah Penghargaan KKS Diberikan Kepada Kabupaten Kota Yang Dapat Memenuhi Persyaratan/Kriteria Capaian Indikator Yang Ditetapkan. Pemberian Penghargaan diberikan setiap 2 tahun sekali, dengan melalui verifikasi Provinsi kemudian diusulkan ke Tingkat nasional. Regulasi di Indonesia terkait Kota Sehat:

- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang pedoman penyelenggaraan KKS

Jumlah kabupaten/ kota sehat adalah Kabupaten/kota yang melaksanakan seluruh tatanan, memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim Pembina Provinsi. (*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*)

Provinsi Jambi memiliki 11 Kab/Kota, Untuk tahun 2022 ada 9 (sembilan) Kab/Kota yang melengkapi dokumen untuk ikut penyelenggarakan Verifikasi

Provinsi dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) dan Rencana Kerja dan Tatanan Indikator sampai dengan triwulan IV Tahun 2022. Sedangkan 2 (dua) Kab. Kerinci dan Kab. Tanjung Jabung Barat hanya memiliki Dokumen Surat Keputusan (SK) Bupati tetapi belum melengkapi atau menyusun Rencana Kerja serta dokumen penyelenggaraan tatanan indikator Kabupaten Kota Sehat.

Kabupaten Kota yang terverifikasi sebagai Kabupaten Kota sehat merupakan kabupaten Kota Sehat dibuktikan dengan adanya SK kelembagaan dan rencana kerja dari Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota Sehat, serta data dukung pelaksanaan kegiatan yang dikirimkan kepada Tim Pembina Provinsi dan telah diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi.

Capaian ODF Kabupaten/Kota

Jumlah desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) *atau Open Defecation Free* (ODF) di Provinsi Jambi sebanyak 921 desa/kelurahan terverifikasi atau sebesar 58,96% dari total 1.562 desa/kelurahan. Desa / Kelurahan terverifikasi ODF/SBS artinya desa/kelurahan tersebut telah dilakukan monitoring dan verifikasi capaian pilar 1(satu) STBM yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan. Verifikasi ODF dilaksanakan oleh tim verifikasi STBM secara benjenjang sesuai dengan capaian pilar-pilar STBM. Verifikasi ODF tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh tim puskesmas/kecamatan, verifikasi ODF tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Dinkes kabupaten/kota dengan melibatkan OPD terkait dan verifikasi ODF tingkat kab/kota dilaksanakan oleh provinsi. Capaian desa/kelurahan ODF kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Persentase Capaian Desa/Kelurahan ODF kabupaten/kota
Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan ODF	% capaian Desa/Kelurahan ODF
1	2	3	4	5
1	Kota Jambi	62	62	100
2	Muaro Jambi	155	126	81,29
3	Tanjung Jabung Timur	93	34	36,56
4	Tanjung Jabung Barat	134	22	16,42
5	Batang Hari	124	94	75,81

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan ODF	% capaian Desa/Kelurahan ODF
1	2	3	4	5
6	Sarolangun	158	120	75,95
7	Merangin	215	94	43,72
8	Bungo	153	64	41,83
9	Tebo	112	91	81,25
10	Kerinci	287	157	54,70
11	Sungai Penuh	69	57	82,61
Provinsi Jambi		1.562	921	58,96

Berdasarkan table 3.32 diatas persentase capaian desa/kelurahan ODF kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang capaian ODF minimal 80% ada 4 (empat) Kab/Kota yaitu :

1. Kota Jambi
2. Kabupaten Muaro Jambi
3. Kabupaten Tebo
4. Kota Sei. Penuh

Yang memenuhi prasyarat untuk kategori wistara dengan cakupan ODF 100 % hanya Kota Jambi.

Persentase capaian desa/kelurahan ODF kabupaten/kota menjadi prasyarat untuk desa/kelurahan untuk diusulkan ke tingkat nasional kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan ODF dengan kriteria :

- a. Kategori PADAPA harus mencapai minimal 80% Desa/Kelurahan *ODF (Open Defecation Free)*;
- b. Penghargaan Swasti Saba Kategori WIWERDA harus mencapai minimal 90% Desa/Kelurahan *ODF (Open Defecation Free)*;

3.2.5. SASARAN 5**Meningkatnya Tatakelola Manajemen Kesehatan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan**

Dalam upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” yang sasaran kinerjanya “Meningkatnya Tatakelola Manajemen Kesehatan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan” dilakukan beberapa kegiatan dan program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun hasil yang dilakukan adalah :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kinerjanya masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media massa ataupun media pengaduan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur khususnya bagi instansi-instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengukur kinerja dan kualitas pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan) sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (pelanggan) perihal kebutuhan dan harapan dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka diadakanlah “SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT”. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan langsung kepada pengguna layanan dalam hal ini masyarakat (pelanggan) pada unit penyedia pelayanan publik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Jambi. Unsur penilaian yang ditetapkan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mengambil unsur yang relevan

sesuai dengan jenis pelayanan yang dinilai, dimana penyusunannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi termasuk pada unit penyedia pelayanan publik yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dan Balai Pelatihan Kesehatan Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Jadwal Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama tahun 2022;
2. Tergambarnya kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama tahun 2022;
3. Teridentifikasinya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Responden pada pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022, responden terbagi dalam karakteristik jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan, dengan dominasi karakteristik adalah sebagai berikut:

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase
1	Jenis kelamin	Perempuan	69,52%
2	Pendidikan terakhir	S1	40,95%
3	Pekerjaan	PNS	60,95%
4	Umur	21-30 Tahun	38,10%

Hasil analisis pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 diperoleh Nilai Rata – Rata (NRR) sebesar 3,447 sehingga dengan demikian berdasarkan nilai tersebut Nilai Interval Konversinya adalah 87,41 yang artinya range kualitas pelayanan mendapatkan kategori “Baik” (pada interval 76,61 s/d 88,30). Berikut kesimpulan hasil analisis nilai IKM:

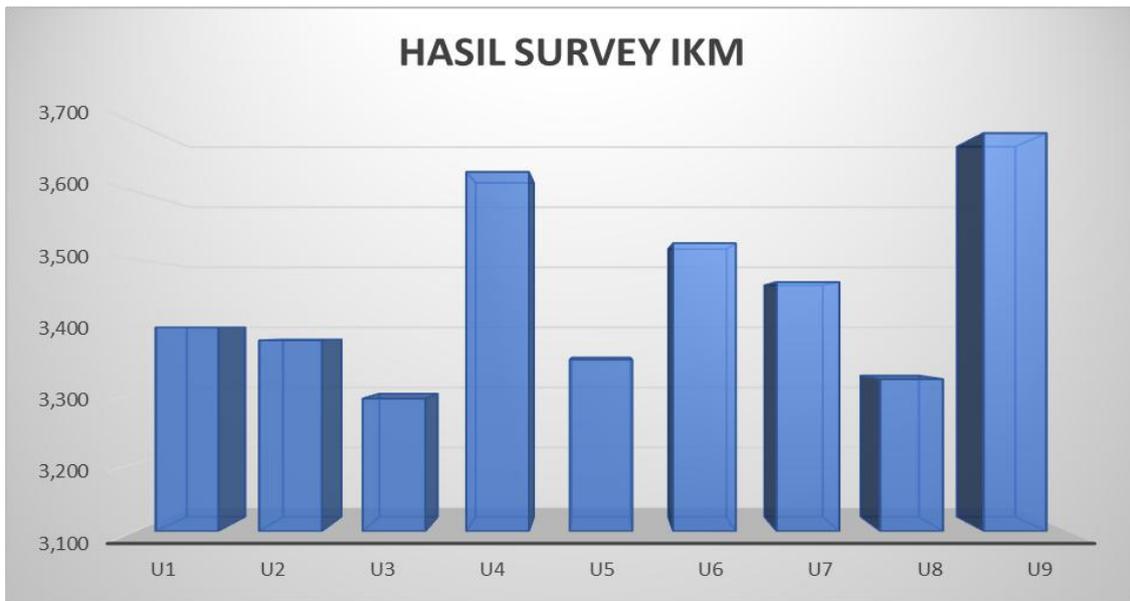
NRR tertimbang	3,447
IKM	87,41
Kategori	Baik

Sedangkan untuk hasil analisis masing-masing unsur pelayanan pada pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 diperoleh Nilai Rata – Rata (NRR) berada pada interval skor 3,295 s/d 3,686 sehingga secara umum dikategorikan dengan kategori “baik”.

Namun ada 2 unsur ruang lingkup penilaian yang sudah berada pada kategori “sangat baik” yaitu unsur 4 untuk ruang lingkup penilaian biaya/tarif dan unsur 9 untuk ruang lingkup penilaian penanganan, pengaduan, saran dan masukan. Sedangkan unsur penilaian paling rendah adalah ruang lingkup penilaian waktu pelayanan namun masih mendapatkan kategori “baik”.

Berikut kategori dan peringkat pelayanan untuk masing-masing unsur pelayanan:

No.	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
U1	Persyaratan	3,400	Baik	5
U2	Prosedur	3,381	Baik	6
U3	Waktu Pelayanan	3,295	Baik	9
U4	Biaya / Tarif	3,629	Sangat Baik	2
U5	Produk Layanan	3,352	Baik	7
U6	Kompetensi Pelaksana	3,524	Baik	3
U7	Perilaku Pelaksana	3,467	Baik	4
U8	Sarana dan prasarana	3,324	Baik	8
U9	Penanganan Pengaduan	3,686	Sangat Baik	1



Jika nilai IKM hasil survei kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022 yaitu 87,41 dengan kategori baik dibandingkan tahun 2021 yaitu 86,18 dengan kategori baik mengalami kenaikan, sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Untuk kedepannya perlu tetap dilakukan peningkatan kualitas pelayanan agar memperoleh penilaian IKM dengan kategori Sangat Baik.

Rekomendasi

Survei Kepuasan Masyarakat harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya secara berkelanjutan karena merupakan salah satu *tools* evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dari hasil survei diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

- Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- Bahan untuk menetapkan kebijakan dan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi akan ditindaklanjuti sebagai berikut:

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten, terutama mempertahankan kualitas unsur layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan yang sudah mendapat kategori sangat baik.

- Tetap melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap unsur pelayanan sebagai dasar perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).
- Perlu penjelasan lebih rinci mengenai SOP produk pelayanan kepada konsumen (masyarakat) sehingga konsumen tahu dengan jelas mengenai persyaratan dan waktu penyelesaian pelayanan dan tidak menganggap penyelenggaraan pelayanan dipersulit atau bertele-tele sehingga unsur waktu pelayanan yang merupakan peringkat terendah dalam penilaian dapat ditingkatkan.
- Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang prima diperlukan komitmen bersama terutama komitmen dari pimpinan.

Arah/sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Disisi lain penerima layanan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi persyaratan layanan serta tidak apatis terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas layanan.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2022 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan 5 Program, 19 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang diterima setelah APBD Perubahan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.161.572.597.365,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.622.262.511,31 atau 91,37% .
2. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah mencapai 98,54% (Sangat Baik). Meskipun telah mencapai kategori sangat baik namun masih ada 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target. Indikator tersebut antara lain Penurunan jumlah kematian ibu, Prevalensi Balita Stunting dan Persentase Kabupaten/Kota Sehat
3. Secara umum pencapaian target kinerja tidak mengalami kendala yang signifikan. Permasalahn indicator kinerja yang tidak mencapai target antara lain Penurunan Jumlah Kematian Ibu dari yang ditargetkan 59 tetapi jumlah kematian meningkat menjadi 72 orang hal ini disebabkan masih tingginya bumil resti yang terlambat mendapat penanganan ketika dirujuk ke rumah sakit. Indikator ke dua yang tidak mencapai target adalah Prevalensi Balita Stunting yang ditargetkan turun mencapai 16% tetapi realisasi sebesar 18%, salah satu penyebabnya adalah penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita kurus dan Bumil KEK tidak dapat terlaksana oleh karena ada surat dari Kementerian Keuangan untuk henti salur (KMK Nomor : 24/KM.7/2022). Indikator ke tiga yang tidak mencapai target adalah Persentase kabupaten/kota sehat, hal ini disebabkan kriteria

untuk kabupaten/kota sehat minimal 80% desa/kelurahan ODF, sedangkan provinsi jambi yang capaian ODF minimal 80% hanya 4 kabupaten/kota.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Terus melakukan konsolidasi internal dan eksternal baik dengan pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten/kota dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya terutama terhadap indikator yang belum mencapai target
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor terkait dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan dan berkala.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas data kesehatan melalui verifikasi dan validasi data kesehatan secara berjenjang melalui umpan balik terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman data kesehatan

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr.MHD. FERY KUSNADI, Sp.OG

Pembina Tk.I

NIP. 19750525 2002121002